

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah)**



Disusun Oleh :

KUNCAHYO WIDYATAMA

B 200110136

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2013

Yang ditulis oleh:

Nama : Kuncahyo Widyatama

NIM : B 200 110 136

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 6 November 2015



Pembimbing



(Drs. Suyatmin, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah)**

Kuncahyo Widyatama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail : kunwidyatama@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh dan jumlah sampel sebanyak 101 data. Data penelitian ini berupa data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 20.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAK, interaksi DAU dan PE, serta interaksi DAK dan PE mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU, PE, serta interaksi PAD dan PE tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap daerah, maka daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatkan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan mampu mendorong akuntabilitas yang lebih baik, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Diberlakukannya otonomi daerah juga menciptakan perbedaan potensi keuangan daerah sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan mendukung otonomi daerah maka Pemerintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah dapat menggunakannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Selain DAU terdapat juga jenis dana perimbangan lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011) dalam Wandira (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) serta Situngkir (2009) membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat Putro (2010) dalam Jaya dan Dwirandra (2014). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan

dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan maupun penambahan aset tetap diperoleh melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Penelitian oleh Sularno (2013) memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Belanja Modal yang tinggi akan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan analisa dalam pengalokasiannya.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Jaya dan Dwirandra (2014) tentang pengaruh PAD pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dengan menambahkan variabel DAU dan DAK.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014), Nuarisa (2013), dan Darwanto dan Yustikasari (2007), memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002b). Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Harianto dan Adi, 2007 dalam Kusnandar 2012). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan Pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh, Tuasikal (2008) dan Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya

untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011) dalam Kusnandar (2012). Namun Moisio (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer). Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011) dalam Arbie (2013). Penelitian yang dilakukan Jiwatami (2013) dan Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja modal

Kebijakan Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Mayasari, dkk (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu,2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004) dalam Sularno (2013). Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₄ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan

meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), serta Jaya dan Dwirandra (2014) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₅ : Interaksi PAD dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Pemanfaatan DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat mendukung peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Mardiasmo (2009:93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

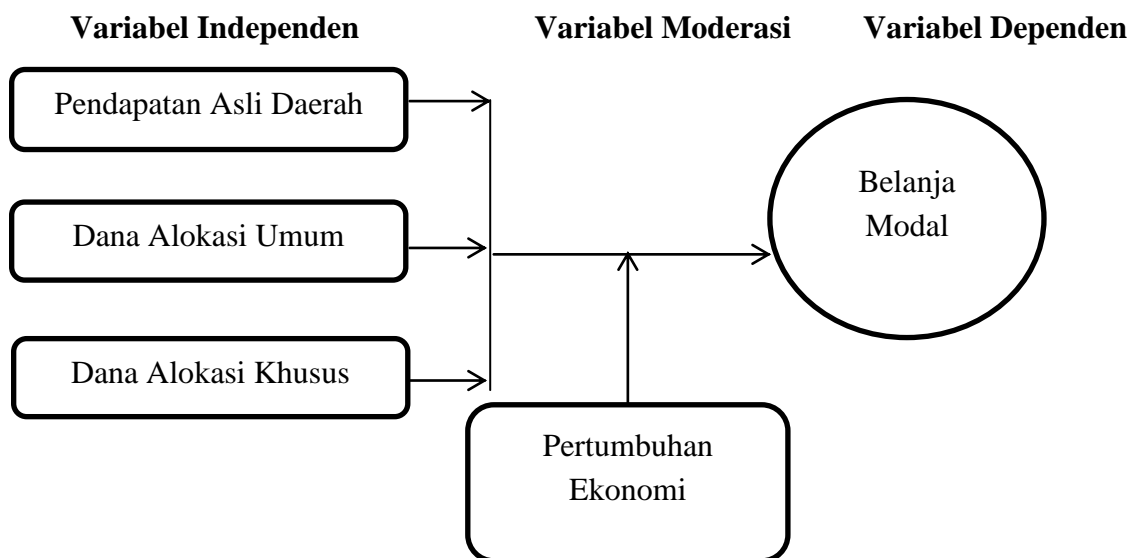
H₆ : Interaksi DAU dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi infrastruktur pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani, 2011) dalam Wandira (2013). Penelitian Ramirez dan Esfahani (1999) dalam Maqin (2011) membuktikan bahwa infrastruktur mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka seharusnya semakin besar dana alokasi khususnya. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H₇ : Interaksi DAK dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Kerangka Pemikiran



Gambar . Kerangka Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten atau Kota di provinsi Jawa Tengah periode 2011 -2013. Metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta basis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data penelitian ini diperoleh dari Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://djpk.depkeu.go.id>), serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (<http://bappeda.jatengprov.go.id>).

Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Variabel-variabel ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dimana data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan landasan teoritis yang diperoleh dari literature dan kemudian ditarik kesimpulan.

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian yang merupakan suatu konsep yang memiliki variasi nilai.

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel Variabel Independen

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen Penelitian
1. Pendapatan Asli Daerah (X1)	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rasio	Laporan Realisasi APBD
2. Dana Alokasi Umum (X2)	1. Dana Transfer Umum	Rasio	Laporan Realisasi APBD
3. Dana Alokasi Khusus (X3)	1. Dana Transfer Khusus	Rasio	Laporan Realisasi APBD
4. Pertumbuhan Ekonomi (X4)	1. PDRB Harga Konstan	Rasio	Tabel PDRB Provinsi Jawa Tengah

Tabel Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen Penelitian
1. Belanja Modal (Y)	1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rasio	Laporan Realisasi APBD

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan empat variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel moderasi. Untuk menguji variabel-variabel tersebut digunakan uji regresi linear berganda (*Multiple Regression*) yaitu uji regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta dilakukan uji interaksi untuk menguji variabel moderasi yang berupa pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*. MRA merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Uji interaksi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal.

Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 PE + \beta_5 PAD * PE + \beta_6 DAU * PE + \beta_7 DAK * PE + e$$

Dimana:

- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- BM : Belanja Modal
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- e : error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis 1

Hasil analisis diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,018 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H_1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD, maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Dengan meningkatnya PAD dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan.

Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil analisis diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai nilai signifikansi sebesar 0,400 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,400 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja modal, maka H_2 ditolak. DAU yang bersifat umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Hasil Uji Hipotesis 3

Hasil analisis diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAK) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,030 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,030 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H_3 diterima. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAK yang diterima oleh daerah, mayoritas digunakan untuk belanja modal.

Hasil Uji Hipotesis 4

Hasil analisis diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,199 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,199 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PE tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja modal, maka H_4 ditolak. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Hasil Uji Hipotesis 5

Hasil analisis diketahui bahwa interaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,222 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,222 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi PAD dan PE tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja modal, maka H_5 ditolak. Hasil dari analisis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan

utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Hasil Uji Hipotesis 6

Hasil analisis diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,010 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H_6 diterima. Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. DAU yang bersifat umum memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan meningkatkan pengalokasian belanja modalnya dengan menggunakan DAU.

Hasil Uji Hipotesis 7

Hasil analisis diketahui bahwa interaksi Dana Alokasi Khusus DAK dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,040 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa interaksi Dana Alokasi Khusus DAK dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H_7 diterima. Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Dari hasil olah data diketahui bahwa PE mampu memoderasi hubungan antara DAK dan belanja modal.

Tabel Hasil Uji Model Regresi

Variabel	B	T	Sig
(Constant)	9128,057	-0,313	0,755
PAD	0,403	2,409	0,018
DAU	0,053	0,846	0,400
DAK	1,134	2,208	0,030
PE	-0,007	-1,293	0,199
PAD_PE	-0,0000000107	-1,231	0,222
DAU_PE	0,0000000222	2,640	0,010
DAK_PE	-0,000000122	-2,083	0,040
R^2	= 0,665		
Adj R^2	= 0,640		
F_{hitung}	= 26,413		

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian memberikan bukti bahwa variabel PAD, DAK, interaksi DAU dan PE, serta interaksi DAK dan PE mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel PAD, DAK, serta interaksi DAU dan PE mempunyai pengaruh positif, sedangkan interaksi DAK dan PE mempunyai pengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi variabel pemoderasi. Sedangkan variabel DAU, PE, serta interaksi PAD dan PE tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel pemoderasi.

Keterbatasan Penelitian

Sampel penelitian ini hanya kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel, sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah dalam penyusunan anggaran belanja modal. Dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga terdapat kemungkinan variabel-variabel lain yang lebih signifikan terhadap belanja modal.

Saran

Pada masa yang akan datang pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi DAK kepada daerah dengan lebih memperhatikan daerah-daerah yang berdasarkan Kriteria Teknis, karena menurut saya masih ada beberapa daerah yang memerlukan dukungan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana. Melihat pengaruh PAD yang sangat signifikan, diharapkan pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber penerimaan daerah secara maksimal. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar tren setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas daerah atau wilayah penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap belanja modal, seperti luas wilayah, DBH, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N. and Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence form State-Level Cross-Section Data for the United States*. *Journal of Urban Economics*, vol.52, pp: 93-108.
- Ardhini. (2011). *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darwanto, & Yulia Yustikasari. (2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Symposium Nasional Akuntansi X*, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip

- Gunantara, Putu Candra & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 (2014): 529-546, ISSN: 2302-8556
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya, I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79-92.
- Jiwatami, Sandhyakalaning. (2013). Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. (2012). Pengaruh dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maqin, Abdul. (2011). Pengaruh Kondisi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Trikonomika*, vol.10
- Mayasari, Luh., dkk. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.2(1)
- Nuarisa, Sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. No.1Vol (3).
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Situngkir, Anggiat. (2009). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada pemko/pemkab sumatera utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiardi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2).

- Sularno, Fitria Megawati. (2013). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Studi Kasus Pada kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*,1(2), h:142-155.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. No.1Vol (3).
- Wertianti, G.,& Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan PAD Dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3).